



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	19 (Sembilan Belas)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II RI.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 12 April 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Membahas terkait PMN untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) maupun PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
Hadir	:	1. 24 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Wakil Menteri BUMN II, Saudara Kartika Wirjoatmodjo; Beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN II RI, pada pukul 10.44 WIB dan rapat dinyatakan secara terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 12 April 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI telah mendapat penjelasan usulan PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN untuk PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam Alokasi Cadangan Investasi APBN 2023 sebesar Rp1.193 Milyar untuk ditempatkan ke ITDC (pengembangan KEK Mandalika) dan HIN (KEK Sanur) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam Alokasi Cadangan Investasi APBN 2023 sebesar Rp3.000 Milyar untuk diteruskan kepada IFG Life akan digunakan sebagai *underlying* pengalihan liabilitas polis dan tetap menjaga tingkat kesehatan keuangan IFG Life.
2. Komisi VI DPR RI akan mendalami penjelasan usulan PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN ini pada masa sidang berikutnya sebagai dasar pengambilan keputusan persetujuan usulan PMN untuk PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait PMN yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang telah mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dilelang, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dalam Pasal 40 Ayat (6).
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk memberikan penjelasan secara detail bagaimana bisnis model dan *multiplier effect* dari pengembangan KEK Mandalika.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.02 WIB.

**WAKIL MENTERI BUMN II RI,**

Ttd.

**KARTIKA WIRJOATMODJO**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA  
A-189**